

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Profesionalitas Guru**

###### **a. Pengertian Profesionalitas**

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa Latin, *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danin, 2002) dalam Rusman (2011:16). Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, istilah profesi, profesional, profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.
2. Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi, b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.
3. Profesionalisme ialah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.
4. Profesionalitas ialah a) perihal profesi, b) keprofesian, c) kemampuan untuk bertindak secara profesional. (Barnawi dan Arifin, 2012a:110)

Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat

dipertanggungjawabkan, Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggungjawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Secara teoritis, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu.

Danim (2011:101-102) mengatakan bahwa secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa Latin *profecus*. Artinya, mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara secara terminologi, profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual.

Menurut Frank H. Blackington dalam Rusman (2011:16), bahwa profesi adalah:

*A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles* (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat).

Kata Blackington, makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan.

Sementara itu, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman,2011:18).

Menurut Dja'man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang meyangsang suatu profesi, misalnya “ dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran.

Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional, pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal...tenaga profesional

tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya.

Lebih lanjut, Moh. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat.

Berdasarkan temuan profesionalisme pun memiliki variasi yang berbeda antar para ahli, namun secara umum istilah profesionalisme sudah dikenal luas dikalangan masyarakat. Pengertian yang muncul dimasyarakat umum seolah-olah hanya teruntuk bagi personil tingkat manajer, sedangkan sesungguhnya istilah profesional itu berlaku untuk semua personil mulai dari tingkat atas sampai ketingkat paling bawah.

Pengertian profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan mentalitasnya. Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

Kusnandar (2007:46) mengemukakan bahwa “Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang”.

Sementara itu Danim (2002:23) mendefinisikan bahwa, profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.

Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) *profesion* mengandung arti yang sama dengan *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Kemudian Freidson (1970) dalam Syaiful Sagala (2002:199) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “sebagai komitmen untuk ide-ide professional dan karir”.

Sedangkan Poerwopoespito & Utomo (2000:266), mengatakan bahwa profesionalisme berarti faham yang menempatkan profesi sebagai titik perhatian utama dalam hidup seseorang. Orang yang menganut faham profesionalisme selalu menunjukkan sikap profesional dalam bekerja dan dalam keseharian hidupnya.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Jadi pada dasarnya profesionalisme berkenaan dengan sikap peduli baik terhadap klien atau pun terhadap profesinya, Seperti yang diungkapkan oleh David H. Maister bahwa profesionalisme adalah terutama masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang professional sejati adalah seorang teknisi yang peduli (Maister, 1998:23).

Dari pemaparan mengenai konsep profesionalisme, penulis dapat simpulkan bahwa, yang paling utama profesionalisme berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimunculkan oleh para profesional dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawab profesinya. Seseorang dengan profesi tertentu mungkin memiliki keterampilan atau kompetensi yang tinggi di bidang keahliannya, tetapi

dia belum bisa dikatakan profesional sebelum secara handal dan konsisten mampu mendemonstrasikannya melalui sikap peduli terhadap klien dan pekerjaannya.

### **b. Dimensi Profesionalisme**

Hall. R (Muhammad, Rifqi. 2008:3) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu:

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*).  
Dedikasi yang dimaksud adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan, yang didukung oleh pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, sehingga muncul komitmen pribadi mencapai kepuasan rohani dan material.
- b. Kewajiban Sosial (*Social obligation*).  
Kemanfaatan peran profesi terhadap masyarakat atau oleh professional dikarenakan pekerjaan tersebut.
- c. Kemandirian (*Autonomy demands*)  
Seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak yang lain.
- d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*).  
Keyakinan bahwa penilaian hasil pekerjaan adalah rekan seprofesi, bukan orang yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- e. Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*).  
Hubungan sesama profesi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan ide- ide utama dalam pekerjaandan membangun kesadaran profesinya.

Berdasarkan hal tersebut, dimensi profesionalisme merupakan sikap yang penting yang perlu dilakukan oleh seorang profesional didalam melakukan profesinya, sehingga dimensi – dimensi tersebut mampu memperkuat tujuan profesional serta meningkatkan profesinya terhadap pekerjaan.

### **c. Ciri-ciri Profesionalisme**

Maister (1998:21-22), mengatakan bahwa ciri-ciri profesionalisme sejati yaitu:

- a. Bangga pada pekerjaan mereka, dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas.
- b. Berusaha meraih tanggung jawab.
- c. Mengantisipasi, dan tidak menunggu perintah, mereka menunjukkan inisiatif.

- d. Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas.
- e. Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka.
- f. Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang yang mereka layani.
- g. Ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis orang-orang yang mereka layani.
- h. Benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang dilayani.
- i. Belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani sehingga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada ditempat.
- j. Adalah pemain tim.
- k. Bisa dipercaya memegang rahasia.
- l. Jujur, bisa dipercaya dan setia.
- m. Terbuka pada kritik-kritik yang membangun mengenai cara meningkatkan diri.

Sedangkan Mahfud MD (Wangmuba, 2009) antara lain menunjukkan beberapa karakteristik budaya akademis yang berpengaruh terhadap profesionalisme sebagai berikut:

- a. Bangga atas pekerjaannya dengan komitmen pribadi yang kuat dan berkualitas.
- b. Memiliki tanggungjawab yang besar, antisipatif dan penuh inisiatif.
- c. Ingin selalu menegrtjakan pekerjaan dengan tuntas dan ikut terlibat dalam berbagai peran diluar pekerjaannya.
- d. Ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan melayani.
- e. Mendengar kebutuhan pelanggan dan dapat bekerja dengan baik dalam suatu tim.
- f. Dapat dipercaya, jujur, terus terang dan loyal.
- g. Terbuka terhadap kritik yang bersifat konstruktif serta selalu siap untuk meningkatkan dan menyempurnakan dirinya.

Berdasarkan paparan di atas dalam meningkatkan profesionalisme yang sejati tidaklah mudah, ciri – ciri tersebut menggambarkan bahwa sebagai seorang profesional diharapkan mempunyai ciri – ciri tersebut. Beberapa hal yang paling penting yang perlu kita sikapi dari kutipan di atas yaitu seorang profesional memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam suatu pekerjaan, inisiatif, melibatkan diri secara aktif, inofatif ,kreatif dalam menyelesaikan dan meningkatkan suatu pekerjaan, serta berusaha mengedepankan kejujuran dan kesetian dalam pekerjaan, sehingga bermanfaat bagi diri dan orang lain.

#### **d. Pengertian Guru**

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 1) dinyatakan bahwa : “Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Guru merupakan sosok yang paling berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Guru merupakan komponen terpenting dalam peristiwa pembelajaran peserta didik. Sebaik apapun program pendidikan yang termuat dalam kurikulum tanpa adanya peranan guru yang mengolahnya menjadi materi yang dapat difahami, tidak akan berarti apa-apa bagi peserta didiknya. Sejalan dengan ini, Bank Dunia (Suhardan, Dadang, 2001: 20) mengemukakan bahwa:

Guru merupakan titik sentral dalam usaha mereformasi pendidikan, dan mereka menjadi kunci keberhasilan setiap usaha peningkatan mutu pendidikan. “apapun namanya, apakah itu pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan pelayanan belajar, penyediaan buku teks, hanya akan berarti apabila melibatkan guru”.

Sementara itu Moh. Fakry Gaffar (2007: 2) menyatakan bahwa: “guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik”. Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang menuntut adanya keahlian khusus di bidangnya (sebagai guru). Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.

Dengan demikian profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya.

### **e. Hakikat Profesi Guru**

Uno (2008:15) mengungkapkan, guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.

Untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut.

- a. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
- b. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.
- c. Guru harus dapat membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian pembelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
- d. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan di berikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi) agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
- e. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
- f. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
- h. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar kelas.
- i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa profesi guru harus dapat mengedepankan siswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga guru mampu membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Menggunakan media dan metode – metode yang bervariasi. Guru mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, membangkitkan semua potensi yang terdapat pada diri siswa sesuai dengan



tingkatannya,serta mampu mengetahui sifat dan karakter siswa begitu juga mampu mengembangkan semua kemampuannya,sehingga siswa mempunyai kepekaan social dan sikap disiplin yang tinggi agar mampu menunjang dalam kegiatan kehidupan sehari – hari.

Guru dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus dikembangkan dengan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.

#### **f. Guru Sebagai Contoh (*Suri Teladan*)**

Uno (2008:15) mengungkapkan, pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Atau dengan perkataan lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik.

Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh (suri teladan) bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.

Seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh peserta didiknya. Untuk itu, apabila seseorang ingin menjadi guru yang profesional maka sudah seharusnya ia dapat selalu meningkatkan wawasan akademis dan praktis melalui jalur pendidikan berjenjang atau pun *up grading* dan/atau pelatihan yang bersifat *in service training* dengan rekan-rekan sejawatnya.

Perubahan dalam cara mengajar guru dapat dilatihkan melalui peningkatan kemampuan mengajar sehingga kebiasaan lama yang kurang efektif dapat segera terdeteksi dan perlahan-lahan dihilangkan. Untuk itu, maka perlu adanya perubahan kebiasaan dalam cara mengajar guru yang diharapkan akan berpengaruh pada cara belajar siswa, diantaranya sebagai berikut.

- a. Memperkecil kebiasaan cara guru baru (calon guru) yang cepat merasa puas dalam mengajar apabila banyak menyajikan informasi (ceramah) dan terlalu mendominasi kegiatan belajar peserta didik.
- b. Guru hendaknya berperan sebagai pengarah, pembimbing, pemberi kemudahan dengan menyediakan berbagai fasilitas belajar, pemberi bantuan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar, dan pencipta kondisi yang merangsang dan menantang peserta didik untuk berpikir dan bekerja (melakukan).
- c. Mengubah dari sekedar metode ceramah dengan berbagai variasi metode yang lebih relevan dengan tujuan pembelajaran, memperkecil kebiasaan cara belajar peserta didik yang baru merasa belajar dan puas kalau banyak mendengarkan dan menerima informasi (diceramahi) guru, atau baru belajar kalau ada guru.
- d. Guru hendaknya mampu menyiapkan berbagai jenis sumber belajar sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dan berkelompok, percaya diri, terbuka untuk saling memberi dan menerima pendapat orang lain, serta membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri informasi.

#### **g. Tugas Guru**

Dalam lingkup profesi guru memiliki beberapa tugas, baik yang terikat oleh profesinya maupun di luar tugas formalnya. Secara garis besar tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni tugas profesi, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Sebagai salah satu profesi resmi kedudukan guru memerlukan keahlian khusus. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pekerjaannya. Terkait dengan hal tersebut Usman

(2008:15) menegaskan bahwa tugas guru sebagai profesi mencakup beberapa persyaratan:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam,
  - b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya,
  - c. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai,
  - d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya, dan
  - e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.
- Usman (2008:15)

Selain persyaratan tersebut, sebetulnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi antara lain yaitu,

- a. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
- b. Memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya, dan
- c. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Berdasarkan paparan tentang pengertian profesionalisme guru dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian/orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya.

## **2. Pentingnya Profesionalitas Guru Dalam Pendidikan**

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik member rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi dalam mengelaborasi kemampuannya.

Guru yang profesional merupakan factor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru professional, mereka harus menemukan jati

diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah – kaidah guru yang profesional.

Berbicara mengenai rendahnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan indikasi perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu guru tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki intress yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah – kaidah profesionalisme guru yang di persyaratkan.

Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus menjadi manajer belajar. Hal ini mengandung arti ,setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia, multi metode dan multi sumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Bekenaan dengan pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan Sanusi et al.(1991:23) mengutarakan 6 asumsi yang melandasi pentingnya profesionalitas dalam pendidikan yaitu :

- (1) Subjek pendidikan
- (2) Pendidikan dilakukan secara intensional
- (3) Teori – teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan
- (4) Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia
- (5) Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya
- (6) Tujuan utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik dengan misi instrumental.

Asumsi – asumsi yang sudah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa profesionalitas harus mengedepankan bahwa siswa merupakan subjek pembelajaran yang mempunyai kemampuan, kemauan, pengetahuan emosi dan perasaan, secara sadar terikat oleh norma- norma dan nilai – nilai dengan cara menerapkan teori – teori pendidikan yang dapat menjawab hipotesa permasalahan pendidikan. pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mengedepankan proses, sehingga mampu mengetahui tingkat kepekaan siswa, emosi dan perubahan mencapai sesuatu, dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan diera Globalisasi profesionalisme guru menjadi hal yang sangat penting. Kemajuan pendidikan

menandakan kemajuan peradaban bangsa. Namun tantangan yang perlu kita sikapi dalam meningkatkan mutu pendidikan setidaknya dalam 2 hal yaitu :

#### 1. Perkembangan Teknologi Informasi

Karsidi ( tahun 2005 ) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak.

Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan. Perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar.

Bagaimanapun kemajuan teknologi informasi di masa yang akan datang, keberadaan sekolah tetap akan diperlukan oleh masyarakat. Kita tidak dapat menghapus sekolah, karena dengan alasan telah ada teknologi informasi yang maju. Ada sisi-sisi tertentu dari fungsi dan peranan sekolah yang tidak dapat tergantikan, misalnya hubungan guru-murid dalam fungsi mengembangkan kepribadian atau membina hubungan sosial, rasa kebersamaan, kohesi sosial, dan lain-lain.

Teknologi informasi hanya mungkin menjadi pengganti fungsi penyebaran informasi dan sumber belajar atau sumber bahan ajar. Bahan ajar yang semula disampaikan di sekolah secara klasikal, lalu dapat diubah menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dari manapun secara individu. (Karsidi, 2004) Inilah tantangan profesi

guru. Apakah perannya akan digantikan oleh teknologi informasi, atau guru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang peran profesinya.

Dunia pendidikan harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistem pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan teknologi informasi tersebut.

Melalui penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang tepat (sebagai bagian dari teknologi pendidikan), maka perbaikan mutu yang berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus secara konsisten/konstan akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha memilih jenis teknologi informasi yang tepat, sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan.

Pemilihan jenis media sebagai bentuk aplikasi teknologi dalam pendidikan harus dipilih secara tepat, cermat dan sesuai kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

## 2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Tjokroamidjyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya.

Bergesernya paradigma pembangunan yang sentralistik ke desentralistik telah mengubah cara pandang penyelenggara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai bagian

dari kebutuhan masyarakat itu sendiri dan bukan semata kepentingan negara. Pembangunan seharusnya mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan sekaligus penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapinya, baik secara individual maupun secara kolektif. Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peranserta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri. Penguatan partisipasi masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri, lebih-lebih dalam era globalisasi. Peranserta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Kontrol rakyat (anggota masyarakat) terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pembangunan bagi dirinya atau kelompoknya.

(Karsidi, 2004) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian otoritas pemerintah pusat ke daerah, untuk mendistribusikan beban pemerintah pusat ke daerah sehingga daerah dan masyarakatnya ikut menanggung beban tersebut. Tujuannya adalah: (1) mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil di tingkat lokal, (2) meningkatkan partisipasi masyarakat, (3) menyusun program-program perbaikan pada tingkat lokal yang lebih realistis, (4) melatih rakyat mengatur urusannya sendiri, (5) membina kesatuan nasional yang merupakan motor penggerak memberdayakan daerah. Dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah pusat lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan mendasar (menetapkan standar mutu pendidikan secara nasional), sementara kebijaksanaan operasional yang menyangkut variasi keadaan daerah didelegasikan kepada pejabat daerah bahkan sekolah.

Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, ada bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu: (1) Substansi pendidikan yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah, seperti PKN, Sejarah Nasional, Pendidikan Agama,

dan Bahasa Indonesia; (2) Pengendalian mutu pendidikan, berdasarkan standar kompetensi minimum; (3) Kandungan minimal konten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar; (4) Standarstandar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan. Program-program pembelajaran di sekolah berupa desain kurikulum dan pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan nonkurikuler sampai pada pengadaan kebutuhan sumber daya untuk suatu sekolah agar dapat berjalan lancar, tampaknya harus sudah mulai diberikan ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pula di lembaga-lembaga pendidikan lainnya nonsekolah, ruang partisipasi tersebut harus dibuka lebar agar tanggung jawab pengembangan pendidikan tidak tertumpu pada lembaga pendidikan itu sendiri, lebih-lebih pada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesigapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bias menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dari pihak masyarakat (termasuk orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat) juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagai contoh tentang partisipasi dunia usaha/industri pada era otonomi daerah. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan/sekolah sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan *output* yang baik dan mengkritiknya jika terdapat *output* yang tidak baik.

Partisipasi dunia usaha/industry terhadap lembaga pendidikan harus ikut bertanggung jawab untuk menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan rumusan harapan bersama. Demikian juga kelompok-kelompok masyarakat lain, termasuk orang tua siswa. Dengan cara seperti itu, maka mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan akan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan dan komponen-komponen lainnya di masyarakat.



Dalam rangka mencapai mutu yang tinggi dalam bidang pendidikan, peranan guru sangatlah penting bahkan sangat utama. Untuk itu, maka profesionalisme guru harus ditegakkan dengan cara pemenuhan syarat-syarat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru, baik di bidang penguasaan keahlian materi keilmuan maupun metodologi. Guru harus bertanggungjawab atas tugas-tugasnya dan harus mengembangkan kesejawatan dengan sesama guru melalui keikutsertaan dan pengembangan organisasi profesi guru.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda – tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan orang – orang yang memang benar- benar ahli dalam bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Profesionalisme tidak hanya karena factor tuntutan dari perkembangan jaman, tapi pada dasarnya merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia.

### **3. Syarat – syarat guru professional**

#### **a. Syarat-Syarat Profesi Guru**

Persyaratan khusus profesi menurut Moh. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam Menekankan pada suatu.
2. keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
4. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Sementara itu, Robert W. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi,
2. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap serta kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya,
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian
8. Memandang suatu profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen

Memandang dua pendapat tersebut menjelaskan bahwa syarat guru profesional diantaranya adalah mempunyai keterampilan konsep, teori ilmu pengetahuan yang mendalam, keahlian dan tingkat pendidikan guru yang memadai, serta mempunyai kepekaan dampak pekerjaan terhadap masyarakat sehingga sejalan dengan dinamika kehidupan. Pelaksanaan kode etik guru, meningkatkan tingkat kegiatan intelektual yang tinggi guna menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan diri dalam aktualisasi sikap, tingkah laku dan kedisiplinan agar perkembangan karir yang kukuh.

#### **b. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru**

Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki (1) Keahlian, (2) Rasa tanggung jawab, (3) rasa kesejawatan yang tinggi.

Sedangkan, Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.
2. Memiliki pengetahuan spesialisasi.
3. Memiliki anggota organisasi profesi.

4. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien.
5. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau *communicable*.
6. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau *self organization*.
7. Mementingkan kepentingan orang lain (*altruism*).
8. Memiliki kode etik. Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja.
9. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas.

Dalam hal ini profesi guru harus mempunyai kemampuan intelektualtinggi,melalui pelatihan – pelatihan yang berkaitan,masuk dalam organisasi profesi serta memiliki teknik – teknik kerja yang dapat dikomunikasikan kepada rekan kerja atau penyampaian informasi kepada siswa. Begitupula mampu mengorganisir pekerjaan secara mandiri tanpa terpengaruh oleh orang lain, mementingkan kepentingan umum atau siswa, menanamkan nilai – nilai moral dan etika, mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan profesionalitas kerjanya.

### **c.Kompetensi Profesional Guru**

Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu

1. *Competence (n) is being competent, ability (to do the work).*
2. *Competent (adj) refers to (person) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc. (to do what is needed)*
3. *Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition*

Melihat ketiga distilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu: Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan definisi kedua, menunjukkan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilan), pengetahuan, untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Kemudian definisi yang ketiga, ialah bahwa kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional

yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.

Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan.

Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. Selanjutnya, kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional.

Sementara itu, Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: Penguasaan bahan bidang studi sangat mutlak dimiliki oleh seorang guru profesional, dengan menguasai bidang tersebut guru dapat leluasa secara gamlang menjelaskan atau mentransper ilmu tersebut kepada siswa sebagai subjek belajar, sehingga guru mampu menjadi pembimbing, fasilitator serta motivator yang baik terhadap kemajuan siwanya atau anak didiknya. Selain itu penguasaan dan penerapan sikap, tingkah laku dan keterampilan dalam mengelola mata pelajaran mampu di perhatikan sebagai model atau figure seorang guru yang

baik. Hal lain yang perlu disikapi tentang kompetensi profesional guru adalah penguasaan teknologi dan informasi karena pada jaman modern ini teknologi informasi merupakan penunjang pokok dalam pengembangan dan penguasaan kurikulum, metode dan teknik mengajar, yang pada akhirnya mampu menjalankan visi dan misi profesional.

#### **4. Kinerja guru profesional**

##### **a. Konsep Kinerja**

Kinerja dapat diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam menghasilkan suatu pekerjaan (Fattah, 2000). Definisi ini menjelaskan bahwa kinerja merupakan catatan hasil kerja atau kegiatan selama periode tertentu. Mangkunegara (2000) mengemukakan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Pendapat ini menunjukkan bahwa kinerja itu merupakan hasil dari pekerjaan. Hasil pekerjaan itu dapat dilihat dari aspek mutu.

Aspek ini menunjukkan seberapa baik. Berikutnya, hasil kerja itu juga dapat ditinjau dari aspek jumlah atau banyaknya yang diperoleh. Selanjutnya Fattah (2003) mengemukakan "kinerja adalah penampilan atau unjuk kerja. Atau cara menghasilkan prestasi".

Mulyasa (2005) mengemukakan kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau unjuk kerja. Smith dalam Mulyana menyatakan "output drive from process, human or otherwise". Dua pendapat ahli tersebut mengungkapkan bahwa kinerja itu merupakan hasil output. Namun Smith menjelaskan bahwa hasil itu diperoleh dari berbagai proses yang ditempuh. Selanjutnya hasil yang didapat itu karena adanya motivasi sebagai pelaku kerja. Lebih lanjut Schuller mengemukakan bahwa kinerja dapat dinilai dan diukur.

Dengan demikian menurut Schuller, penilaian kinerja diartikan sebagai sistem formal dan berstruktur dari suatu pengukuran. Evaluasi dan pengaruh kerja pegawai berkaitan dengan sumbangsih, tingkahlaku, dan dampak. Seperti angka ketidakhadiran, untuk menemukan seberapa produktif seorang pegawai.

Organisasi dan masyarakat umumnya diuntungkan.

Pendapat ini sejalan dengan Casletter (1996) yang mengemukakan bahwa Penilaian kinerja diartikan sebagai suatu proses mendapatkan pertimbangan tentang kinerja individu, masa lampau, dan sekarang dihadapkan dengan latar belakang lingkungan kerjanya dan potensi masa depannya bagi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan kerja seseorang didasari oleh pengetahuan. Sikap. Keterampilan, dan motivasi di dalam menjalankan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

#### **b.Guru Profesional**

Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan baik akademik, pedagogis, pribadi maupun sosial. Guru tersebut diidentikan dengan sosok yang patut digugu dan ditiru. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada empat kompetensi yang harus dimiliki/dikuasai oleh seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogic, dan kompetensi professional. Adapun apabila guru telah memiliki keempat kompetensi tersebut di atas, maka guru tersebut telah memiliki hak professional karena telah memenuhi syarat – syarat berikut :

1. mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah – langkah interaksi edukatif dalam batas tanggungjawabnya dan ikutserta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
3. Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari – hari.
4. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha – usaha dan prestasi yang inofatif dalam bidang pengabdianya.
5. menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional. ( Rusman 2013 )

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru profesional adalah penampilan kerja seseorang didasari oleh pengetahuan. Sikap. Keterampilan, dan motivasi di dalam menjalankan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya serta mampu mengaktualisasikan kompetensi profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **5. Kriteria Kualitas kinerja guru**

Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi guru. Dijelaskan bahwa standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi Pedagogik, kepribadian, Sosial dan profesional.

Standar Kompetensi Guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi Kompetensi Guru PAUD /TK/RA, Guru Kelas SD/MI, dan Guru Mata Pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Menurut Glasser ( 1918 ), berkenaan dengan kompetensi guru, ada empat hal yang harus dikuasai guru yaitu menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis tingkah laku siswa, mampu melaksanakan proses pembelajaran, dan mampu mengevaluasi belajar siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh setiap guru yang akan dijadikan tolok ukur kinerja guru yaitu :

### **a. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan *kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.*

Esensi dari kelima sub kompetensi kepribadian di atas yaitu : Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma social, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani serta bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

#### b. Kompetensi Pedagogik

Pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator esensial sebagai berikut.

Dalam hal ini dimaksudkan adalah guru mampu memahami perkembangan kognitif, kepribadian dan mengidentifikasi bekal-ajar peserta didik, mampu merancang pembelajaran, memahami landasan kependidikan yaitu menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Esensi lain yaitu guru mampu melakukan konsep pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif, merancang dan melakukan evaluasi proses hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode : menganalisis, proses hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar; dan memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Kompetensi yang penting juga dalam kompetensi pedagogik seorang guru adalah mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, dengan cara memfasilitasi perkembangan akademik maupun non akademik.

#### c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

- 1) Menguasai substansi keilmuan memiliki
- 2) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan



Kompetensi profesional seorang guru yang dimaksudkan adalah memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan keilmuan dalam kehidupan sehari-hari,sertamenguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan / materi bidang studi.

#### d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

1. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.
2. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pendidik dan tenaga kependidikan lain.
3. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kompetensi (kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial) tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. Sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompeten memiliki:

1. pemahaman terhadap karakteristik peserta didik,
2. penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan,
3. kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan
4. kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

Dalam menciptakan suasana belajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan guru perlu diarahkan untuk mencapai keempat kompetensi tersebut.

Jonson dalam Idochi Anwar ( 2003:52),mengetengahkan tiga aspek kinerja guru,yaitu :

1. Kemampuan Profesional yang mencakup : a) penguasaan pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan,dan konsep – konsep dasar keilmuan dan bahan yang diajarkan itu,b) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, dan c) penguasaan proses pendidikan,keguruan, dan pembelajaran siswa.
2. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru
3. Kemampuan personal guru,mencakup : a) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru,dan terhadap seluruh situasi pendidikan beserta unsur – unurnya, b) pemahaman, penghayatan,dan penampilan nilai – nilai yang seyogianya dianut oleh seorang guru,dan c) kepribadian, sikap hidup, penampilan, upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

Dengan demikian bagi seorang guru, kinerja erat kaitannya dengan kegiatannya di sekolah, dimana tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan dapat diartikan bahwa belajar mengajar merupakan bagian dari kinerja guru di sekolah

Berdasarkan uraian diatas,dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja guru mulai dari merencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran,sampai dengan mengevaluasi hasil dari suatu kegiatan pembelajaran, yang dilaksanakan dengan sikap professional sesuai dengan tujuan yang di tetapkan. sedangkan ukuran standar kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui baik buruknya atau efektif tidaknya kinerja seorang guru.

## **6.Program Peningkatan Mutu Guru**

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun perangkat penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Keadaan ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar

mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmauan dan ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan tuntutan perkembangan lingkungan profesinya justru akan menjadi salah satu faktor penghambat ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Menurut Notoatmojo ( 2009 : 17 ) pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi.olehkarena itu setiap organisasi atau intansi yang ingin berkembang, maka pendidikan dan pelathan karyawan harus memperoreh perhatian yang besar.Pentingnya pelatihan tersebut dikarenakan kemajuan ilmu dan teknologi,jelas akan mempengaruhi intansi yang secara tidak langsung akan mendorong penembahan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan tertentu.

Begitu juga menurut John H.Proctor dan William M.Thornton dalam Sedarmayanti ( 2013 : 163 ) mengatakan bahwa “ *training is the international act of providing means for learning to take place* “pelatihan adalah tindakan yang disengaja memberikan alat agar pembelajaran dapat dilaksanakan.

Instruksi Presiden No.15 tahun 2014 dalam sedarmayanti (2013: 164) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu.

Bardasarkan paparan tersebut diatas jelas bahwa program pelatihan atau training sangat diperlukan dalam peningkatan sumberdaya manusia terutama salah satunya profesi guru.

Menurut buku kebijakan pengembangan profesi guru (2012 ) dijabarkan bagaimana program - program yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan mutu guru.

Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini.

#### 1. Pendidikan dan Pelatihan

##### a. Inhouse training (IHT).

Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.

##### b. Program magang.

Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.

##### c. Kemitraan sekolah.

Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah.

##### d. Belajar jarak jauh.

Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.

##### e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus.

Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.

##### f. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.

##### g. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 20 mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.

##### h. Pendidikan lanjut.

Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi.

## 2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

### a. Diskusi masalah pendidikan.

Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah.

### b. Seminar.

Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru.

### c. Workshop

Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.

### d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

### e. Penulisan buku/bahan ajar.

Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.

### f. Pembuatan media pembelajaran.

Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).

### g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Menurut Penetapan Permeneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Sehingga peran guru sangat dominan dan tidak statis hanya mengandalkan pengalaman masa lalu saja. Program peningkatan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu program pemerintah yang wajib dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses

pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik.

Dalam kaitannya dengan PKB ini, beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh guru dan di sekolah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan berikut ini.

1. Dilakukan oleh guru sendiri:
2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain:
3. Dilakukan oleh sekolah :
  - a. training day untuk semua sumber daya manusia di sekolah (bukan hanya guru);
  - b. kunjungan ke sekolah lain; dan
  - c. mengundang nara sumber dari sekolah lain atau dari instansi lain.

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan PKB guru dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang.

Dengan PKB untuk guru, bagi sekolah/madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, PKB untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah, PKB untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur.

## **7. Evaluasi diri Sekolah ( EDS )**

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program

pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Pada tataran operasional, penjaminan mutu dilakukan melalui serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan lain yang relevan dengan implementasi delapan standar nasional pendidikan.

### **b. Tujuan (EDS)**

EDS di sekolah diperlukan sebab sampai sekarang belum ada satupun alat yang dapat dipakai oleh sekolah untuk memberikan gambaran umum dalam aspek SPM dan 8 SNP secara nyata, akurat dan berdasarkan bukti-bukti tentang seluruh kinerja sekolah sebagai dasar untuk membuat RPS/RKS dan peningkatan mutu professional seluruh pemangku kepentingan sekolah.

Walaupun sudah ada beberapa upaya evaluasi di sekolah, kebanyakannya adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar, jadi sifatnya eksternal, untuk menilai sekolah seperti untuk akreditasi, pemberian bantuan dsb. Dengan demikian kehadiran EDS amat diperlukan oleh sekolah karena evaluasi ini adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh dan untuk sekolah sendiri guna mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri – semacam cermin muka yang dapat dipakai dalam melihat kekuatan dan kelemahannya sendiri untuk selanjutnya dipakai dasar dalam upaya memperbaiki kinerjanya.

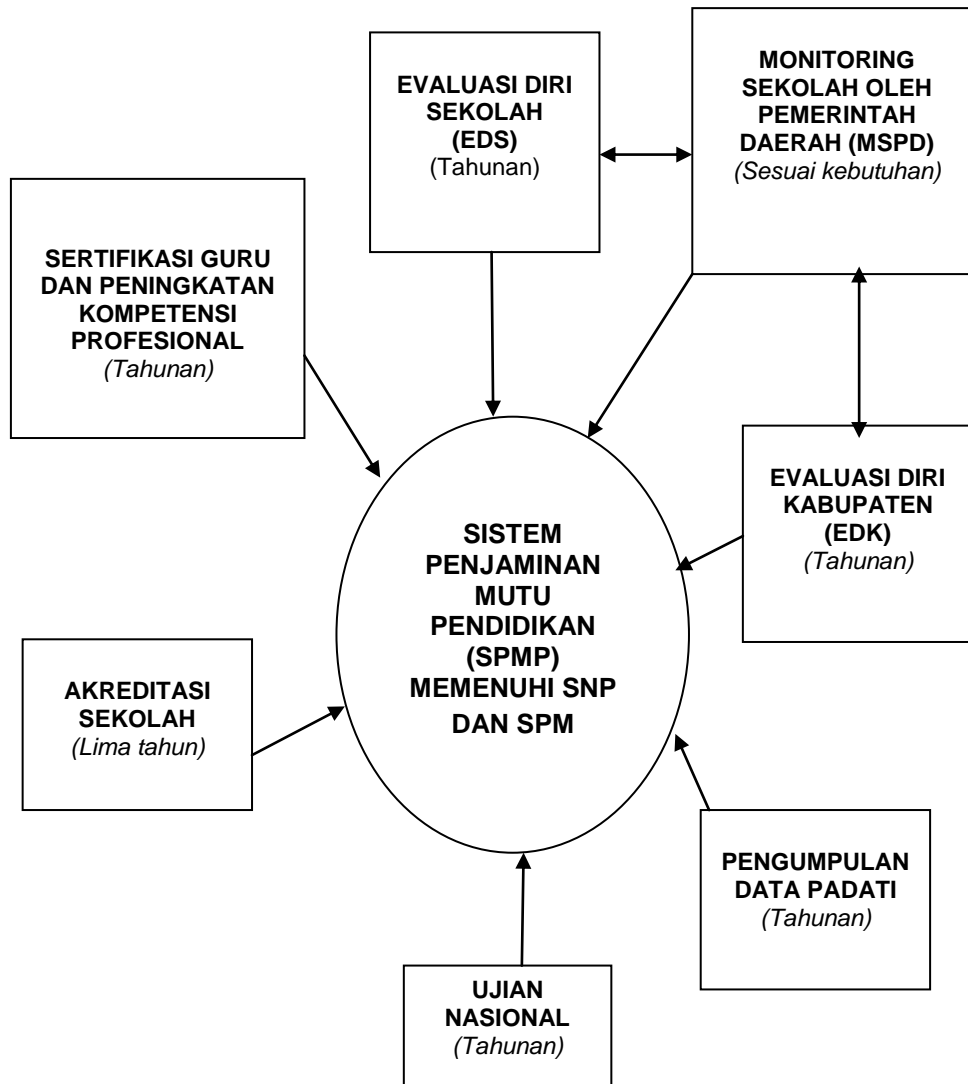
Hasil EDS juga dapat dipakai oleh Pengawas untuk laporan kepada pihak Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag kab/kota melalui kegiatan “Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah” (MSPD) sebagai masukan untuk dasar Perencanaan Peningkatan mutu Pendidikan dan dasar pemberian bantuan / intervensi ke sekolah sekolah.

### **c. Keterkaitan EDS dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu**

EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dan Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, Renstra Kemendiknas, dan Renstra Kemenag.



Diagram di bawah ini menggambarkan EDS sebagai salah satu komponen sumber data dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mengacu pada Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.



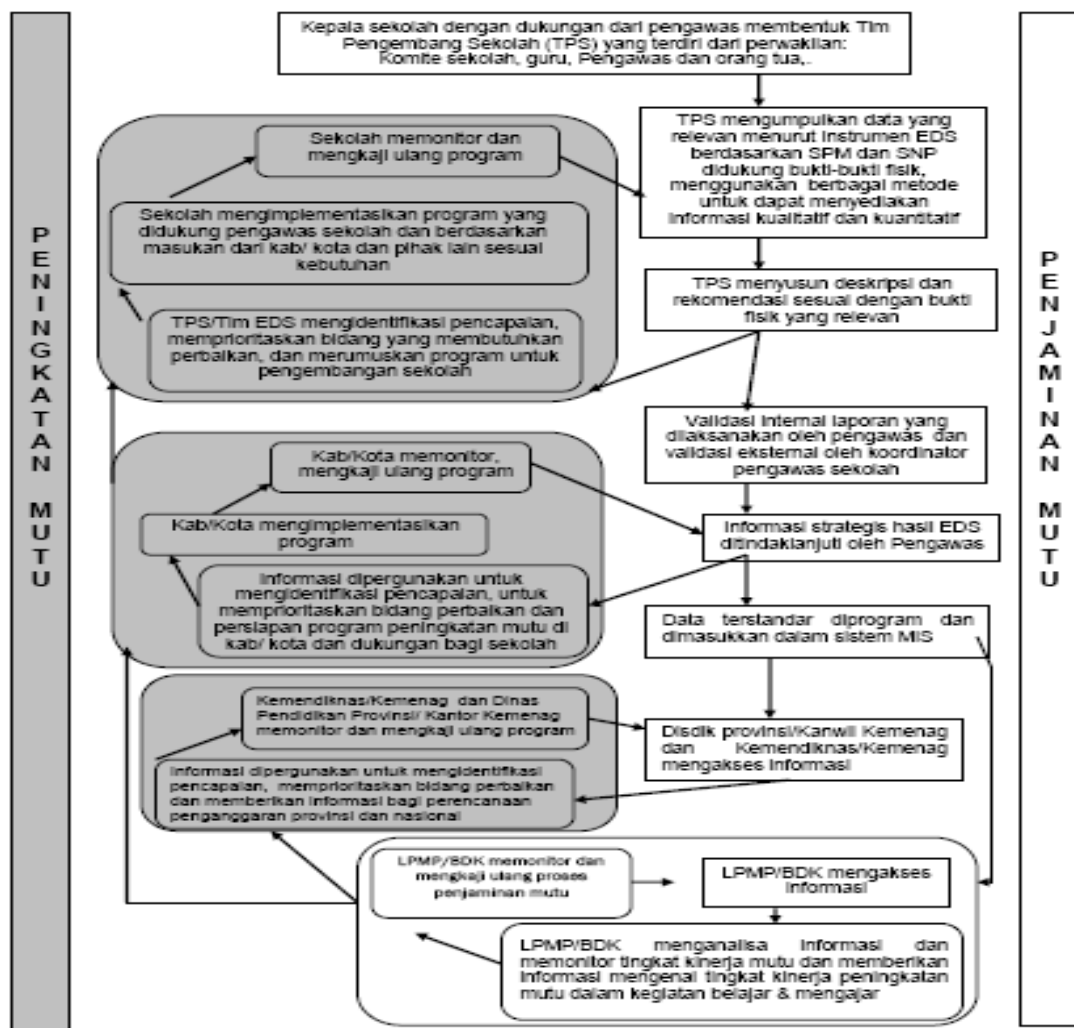
Gambar : 2.1

Kerangka Pemikiran EDS sebagai salah satu Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Pedoman Teknis Evaluasi diri sekolah ( EDS )Kementrian Pendidikan nasional tahun 2010

Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). EDS juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Karena itulah EDS menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah.

Pada diagram EDS dalam Kaitannya dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu, terlihat alur informasi dan urutan kegiatannya.



Gambar : 2.2

Diagram EDS dalam Kaitannya dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu

## Pendidikan

Pedoman Teknis Evaluasi diri sekolah ( EDS )Kementrian Pendidikan nasional tahun 2010

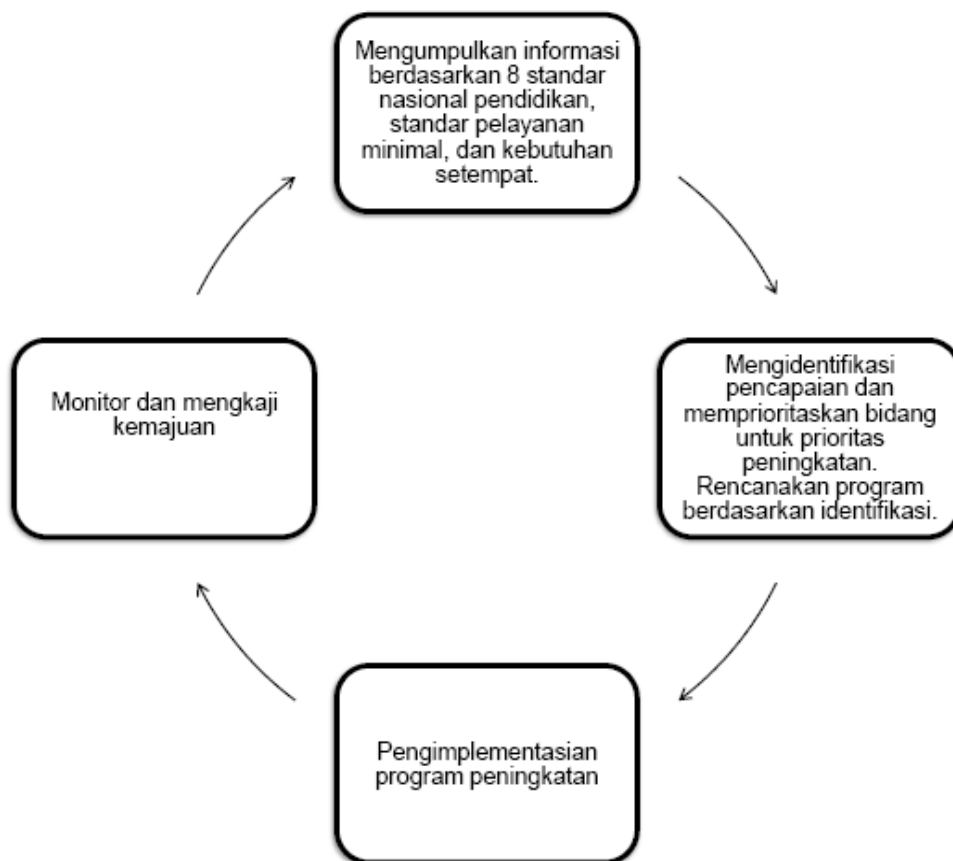
Kegiatan EDS berbasis sekolah juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan validitasi proses.

EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional.

### **d. Strategi Implementasi**

Selama berjalannya proses EDS, diharapkan dapat dibangun adanya visi yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terhadap sekolah mereka. Untuk dapat membangun visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakukan adalah semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses untuk menyepakati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama ini yang akan membawa arah pengembangan sekolah ke depan dengan lebih jelas.

Sekolah mengukur dampak dari berbagai kegiatan pentingnya terkait dengan peserta didik dan kegiatan pembelajaran (belajar mengajar); setiap tahun sekolah juga memeriksa hasil dan dampak dari kegiatan belajar mengajar serta bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah sekolah harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan peningkatan dan mempersiapkan rencana pengembangan/peningkatan sekolah. Proses ini kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan.



Gambar 2.3

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Pedoman Teknis Evaluasi diri sekolah ( EDS )Kementrian Pendidikan nasional tahun 2010

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat, dan pengawas sekolah) diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan dalam proses EDS menjadi bagian dari etos kerja sekolah. Penting diingat adalah bahwa informasi yang didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh pihak luar. Proses EDS harus menjadi suatu refleksi untuk mengubah dan memperbaiki tata kerja, serta akan dianggap berhasil jika dapat

membawa sekolah pada peningkatan pelayanan pendidikan dan hasilnya bagi para peserta didik. Kemudian sekolah akan menjadi pelaku utama dalam peningkatan mutu dan memberikan penjaminan terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan EDS, yakni:

#### 1. Persiapan

Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS secara berkelanjutan. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan sekolah melaksanakan evaluasi secara transparan, untuk menjamin validitas dan mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pengembangan sekolah.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan mempergunakan sistem berikut ini:

- a. LPMP/BDK dilatih sebagai pelatih bagi pelatih (Trainers of Trainers/ToT).
- b. Kepala Seksi Kurikulum, Koordinator Pengawas, beberapa Pengawas dilatih oleh LPMP/BDK.
- c. Koordinator Pengawas dan pengawas sekolah terpilih melatih Tim TPS/EDS dalam gugus sekolah.

#### 2. Melaksanakan Proses Evaluasi Diri Sekolah

Setelah pelaksanaan pelatihan, kepala sekolah dengan dukungan pengawas sekolah pembina melaksanakan EDS bersama Tim TPS yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, Pengawas dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan.

Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk menetapkan profil kinerja sekolah berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisa dan dipergunakan oleh TPS untuk mengidentifikasi kelebihan dan bidang perbaikan yang dibutuhkan, serta merencanakan program tahunan sekolah. Pengawas sekolah pembina harus dilibatkan secara penuh untuk mendukung sekolah dalam proses tersebut, serta dalam mengimplementasikan rencana perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini.

Keterlibatan pengawas sekolah juga akan mendorong terciptanya transparansi dan keandalan data yang dikumpulkan, serta membantu sekolah

untuk melangkah maju dalam program perbaikan berkelanjutan. Pengawas sekolah dan kepala sekolah akan menjadi pemain inti dalam melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang realistis mengenai sekolah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya sekedar mengisi data yang menunjukkan pencapaian standar.

Instrumen EDS didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan dua tujuan untuk menyediakan informasi bagi rencana pengembangan sekolah, seiring dengan pemutakhiran sistem manajemen informasi pendidikan nasional. Bidang dan pertanyaan inti yang disediakan dalam instrumen tersebut merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi sekolah yang diperlukan untuk merencanakan perbaikan sekolah. Karena itulah maka perlu diantisipasi agar sekolah dapat melakukan proses ini dengan benar dan tidak memandangnya sekedar sebagai kegiatan pengisian formulir. Penting untuk ditekankan disini adalah sekolah harus mendeskripsikan situasi nyata yang ada di sekolah mereka dan kemudian, saat proses ini diulang, mereka harus mampu menunjukkan adanya perbaikan seiring dengan waktu yang berjalan.

## **8. Manfaat Evaluasi Diri Sekolah ( EDS ) dalam mengembangkan Kinerja Guru**

Bedasarkan Panduan teknis evaluasi diri sekolah ( 2010 : 7-8 )Kementrian pendidikan nasional, menjelaskan bahwa manfaat EDS diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah sendiri dan bagi pemerintahan Kab/Kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan EDS.

### **1. Bagi sekolah**

- a. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan.
- b. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.

- c. Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya.
  - d. Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah.
2. Bagi tingkatan lain dalam sistem (Pemerintah, pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi)
- a. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
  - b. Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
  - c. Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah.
  - d. Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya.
  - e. Mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal.

Serta berdasarkan Instrumen EDS pada panduan teknis Evaluasi Diri Sekolah yang mengacu pada 8 standar pendidikan nasional, manfaat EDS terhadap pengembangan kinerja guru akan terlihat pada instrumen standar standar pendidik dan tenaga kependidikan, dimana didalamnya membahas tentang

- a. Apakah kinerja pengelolaan berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat, dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak?
- b. Bagaimana cara mendukung dan memberikan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan?
- c. Apakah pemenuhan jumlah guru dan pegawai lain sudah memenuhi?

Seperti kita dapat melihat pada tabel instrument EDS berikut :

Daftar Tabel 2.1  
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

<b>6.5. Bagaimanakan cara mendukung dan memberikan kesempatan pengembangan profesi bagi para guru dan tenaga kependidikan</b>			
<b>Spesifikasi dalam standar pengelolaan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b></li> <li>o Sekolah mengatur keefektifan program pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pengembangan profesi</li> <li>• <b>Supervisi dan Evaluasi</b></li> <li>o Supevisi dan evaluasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan standar guru dan tenaga kependidikan</li> </ul>			
<b>Indikator Pencapaian</b>			
<b>Tingkat 4</b>	<b>Tingkat 3</b>	<b>Tingkat 2</b>	<b>Tingkat 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kami mendukung para pegawai kami untuk dapat memberikan yang terbaik dari diri mereka dan mengakui dan merayakan prestasi. Mereka yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan secara berkala mengkomunikasikan keberhasilan pegawai dan mengemukakan praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan</li> <li>➢ Staf kami menerima informasi mengenai kesempatan untuk pengembangan profesi dan didorong untuk mengaksesnya</li> <li>➢ Kami menyikapi dan memonitor masalah kesetaraan dan keadilan bagi staf kami secara sistematis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru bermotivasi tinggi dan ada pengakuan atas prestasi mereka</li> <li>➢ Guru kami diberikan peluang pengembangan profesi yang relevan</li> <li>➢ Terdapat proses yang jelas untuk penilaian guru yang dilakukan oleh kepala sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sebagian pegawai kami merasa bahwa mereka yang memegang tanggung jawab kepemimpinan tidak menghargai prestasi yang dicapai secara memadai dan mereka kekurangan motivasi</li> <li>➢ Guru kami tidak selalu memiliki akses terhadap pengembangan profesi yang sesuai</li> <li>➢ Kami tidak memiliki proses penilaian pegawai yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Banyak pegawai kami yang merasa bahwa prestasi mereka tidak diakui dan mereka sangat tidak bermotivasi</li> <li>➢ Kami tidak mendorong pegawai kami untuk mengambil kesempatan pengembangan profesi karena kami ingin mereka berfokus pada pekerjaan mereka di sekolah</li> <li>➢ Pihak pimpinan akan memberikan teguran kepada pegawai sesuai kebutuhan</li> </ul>

Kementrian Pendidikan Nasional (2010).*Petunjuk Teknis Evaluasi Diri Sekolah*. Jakarta: Depdiknas

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat EDS dalam mendorong peningkatan Kinerja Guru dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan RPS dan RKS yang telah dibuat oleh masing – masing lembaga pendidikan.

## **9. Manfaat Evaluasi Diri Sekolah ( EDS ) dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran**

Sementara itu manfaat Evaluasi Diri Sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran juga terdapat pada isi dari insrtumen EDS yang menekankan pada



standar Proses dan standar kompetensi mutu lulusan. Dalam hal ini poin – poin penting yang terdapat pada instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Daftar Tabel 2.2  
Standar Proses

a. Standar Proses

3. STANDAR PROSES			
3.1. Apakah silabus sudah sesuai dan relevan?			
Spesifikasi dalam standar proses			
Standar proses			
A: Silabus			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silabus dikembangkan berdasarkan standar isi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan panduan kurikulum (KTSP)</li> <li>• Silabus diarahkan pada SKL.</li> </ul>			
Indikator Pencapaian			
Tingkat 4	Tingkat 3	Tingkat 2	Tingkat 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Silabus sekolah kami dikaji dan diperbaiki secara teratur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat</li> <li>➢ Silabus sekolah kami memiliki kelenturan (fleksibilitas) bagi guru untuk memenuhi ragam kebutuhan semua peserta didik</li> <li>➢ Silabus sekolah kami dirancang agar menawarkan pembelajaran yang relevan, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan serta menawarkan kemajuan yang berjenjang sesuai tingkat usia dan kemampuan peserta didik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Silabus sudah dikembangkan oleh sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat</li> <li>➢ Kami selalu mempertimbangkan keterkaitan antara mata pelajaran dan komponennya sereta waktu yang cukup dalam pembuatan silabus kami</li> <li>➢ Program dan pembelajaran sudah relevan dengan tingkat usia dan minat peserta didik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Silabus sekolah kami menyesuaikan dengan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP, namun kami belum mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan setempat.</li> <li>➢ Peserta didik sekolah kami merasa mata pelajaran dan program yang diperoleh tidak selalu terkait dengan kebutuhan mereka</li> <li>➢ Sekolah kami berusaha mempertimbangkan usia dan minat peserta didik saat membuat program dan mata pelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Silabus sekolah kami berusaha mengikuti standar isi, standar kompetensi, dan panduan KTSP.</li> <li>➢ Sistematika dan rancangan silabus sekolah kami tidak memberikan waktu kepada para peserta didik untuk memahami konsep baru secara utuh sebelum melanjutkan pembelajaran</li> <li>➢ Sekolah kami tidak mempertimbangkan usia dan minat peserta didik saat membuat program dan mata pelajaran</li> </ul>

Kementrian Pendidikan Nasional (2010). *Petunjuk Teknis Evaluasi Diri Sekolah*. Jakarta: Depdiknas

Tabel diatas merupakan salah alat evaluasi diri sekolah (EDS), alat tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sekolah dalam melakukan EDS sebagai Feed back untuk meningkatkan apakah standar proses sudah dilakukan dengan maksimal atau belum, jika belum perlu ada evaluasi serta ditindak lanjuti pada pembuatan rencana program tahunan.

b. Standar Kompetensi Lulusan

1. Peserta didik dapat mencapai target akademik yang diharapkan
2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat

Hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini

Daftar Tabel 2.3  
Standar Kompetensi Kelulusan

5. Kompetensi Lulusan			
5.1. Apakah peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan?			
<u>Spesifikasi dalam Standar Kompetensi Lulusan</u>			
a. Hasil belajar peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan			
Indikator pencapaian			
Tingkat 4	Tingkat 3	Tingkat 2	Tingkat 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Semua peserta didik menunjukkan kemajuan, percaya diri, dan memiliki harapan yang tinggi dalam berprestasi.</li> <li>&gt; Peserta didik kami mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis, dan analitis serta mengembangkan kreatifitas mereka</li> <li>&gt; Sekolah kami sudah mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang sebelumnya masih rendah/kurang.</li> <li>&gt; Sekolah kami memastikan kebutuhan peserta didik yang berkemampuan rendah dapat terpenuhi secara efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sebagian besar peserta didik menunjukkan kemajuan yang baik dalam mencapai target yang ditetapkan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.</li> <li>&gt; Peserta didik kami mampu menjadi pembelajar yang mandiri</li> <li>&gt; Peserta didik kami memiliki rasa percaya diri dan mampu mengekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat mereka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sebagian kecil peserta didik telah menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik, namun tidak konsisten</li> <li>&gt; Kami belum merumuskan dan mengupayakan target belajar yang bisa dicapai bagi semua peserta didik agar mereka bisa berhasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hasil belajar peserta didik masih rendah disebabkan oleh pemakaian program belajar yang kurang beragam, kurang percaya diri dan semangat belajar yang rendah.</li> <li>&gt; Guru-guru dan peserta didik memiliki harapan yang rendah dalam berprestasi.</li> </ul>

Kemendrian Pendidikan Nasional (2010).*Petunjuk Teknis Evaluasi Diri*

*Sekolah*.Jakarta: Depdiknas

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat EDS terhadap peningkatan mutu pembelajaran akan semakin tinggi, dimana setiap lembaga pendidikan berusaha mengkondisikan seluruh elemen dalam lembaga tersebut, terutama proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan visi misi sekolah.

Dadan Wahyu Alamsyah, 2015

**ANALISIS EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS) HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA GURU DAN MUTU PEMBELAJARAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 10. Mutu Pembelajaran

### a. Konsep mutu

Beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh Prof. Dr. H. Abdul Hadis, M.Pd, dan Prof. Dr. Hj. Nurhayati B, M. Pd, dalam bukunya Manajemen Mutu Pendidikan (2010:84) menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut Juran (1993), mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu (1) teknologi; yaitu kekuatan; (2) psikologis, yaitu rasa atau status; (3) waktu, yaitu kehandalan; (4) kontraktual, yaitu ada jaminan; (5) etika, yaitu sopan santun

Menurut Juran memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan sangatlah penting, karena pelanggan merupakan mitra kerja yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan dan pemenuhan kebutuhan tersebut.

- b) Menurut Crosby (1979:58) mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Menurut Crosby mutu merupakan proses dari awal hingga akhir, dan dari setiap tahapan proses menjadi perhatian yang penting, setiap tahapan tersebut diarahkan agar tidak terjadi kesalahan, sehingga mutu dapat dipertanggungjawabkan dan kepuasan pelanggan semakin meningkat.

- c) Menurut Deming (1982:176) mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa.

Lain halnya dengan Deming, kebutuhan pasar menjadi perhatian yang mendalam, kebutuhan pasar sangat berubah-ubah, sehingga perhatian terhadap

perubahan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan mutu yang sesuai, kepuasan konsumen akan mengakibatkan kesetiaan dalam membeli produk dari barang tersebut.

Dari beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk atau dapat juga dipahami bahwa mutu adalah gambaran total suatu produk/ jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan kebutuhan dan kepuasan customer yang sekurang-kurangnya ada dua hal penting yang terkait dengan penjelasan tentang mutu, yaitu :

- a) Mutu adalah gambaran total dari keseluruhan proses, mulai dari pra pelayanan (mulai dari tahap pendidikan), pelayanan , dan pasca pelayanan.
- b) Mutu adalah sesuatu yang intangible atau tidak bisa diukur. Satu – satunya tolak ukur adalah kepuasan pelanggan / pasien. Dengan sendirinya kemampuan mengembangkan mutu bergantung pada kemampuan untuk menjawab kebutuhan pelanggan.

### **b. Konsep pembelajaran**

Makna pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Lebih lanjut, Wina Sanjaya (2008:51) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan membelajarkan siswa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap guru penting untuk memahami sistem pembelajaran, karena dengan pemahaman sistem ini, setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian tersebut.

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu (Wina Sanjaya, 2008:86). Lebih lanjut, Wina Sanjaya (2008:88) mengemukakan bahwa rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (siapa yang harus memiliki kemampuan), *Behaviour* (perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dimiliki), *Condition* (dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya), dan *Degree* (kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal).

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu mempertimbangkan perubahan - perubahan dalam proses pembelajaran, yang antara lain ditandai dengan adanya perubahan dari model belajar terpusat pada guru ke model terpusat pada peserta didik, dari kerja terisolasi ke kerja kolaborasi, dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran informasi, dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif dan partisipatif, dari yang bersifat faktual ke cara berpikir kritis, dari respon reaktif ke proaktif, dari konteks *artificial* ke konteks dunia nyata, dari *single media* ke *multimedia*. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpotensi mengembangkan suasana belajar mandiri.

Dalam hal ini, pembelajaran dituntut dapat menarik perhatian peserta didik dan sebanyak mungkin memanfaatkan momentum kemajuan teknologi khususnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*). Membahas tentang teknologi, tak lepas dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan berbagai kemungkinan penerapannya, khususnya pada pembelajaran. Kekuatan TIK pada pembelajaran, akan melahirkan konsep *E-Learning*, manfaat *E-Learning*, dan bahan-bahan pembelajaran untuk *E-Learning* (Budi Murdiyasa, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan berbagai komponen, yaitu guru, siswa, tujuan, materi, metode, media, evaluasi dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai. Pada penelitian ini, proses pembelajaran menggunakan media *online* (*ELearning*) untuk menyampaikan materi sekaligus membudayakan peserta didik untuk mencari referensi belajar secara *online*, lebih luas dan mandiri.

Berarti Mutu pembelajaran adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan standar proses dan memenuhi kebutuhan / harapan orang tua dan siswa. Mutu pembelajaran juga merupakan sumber dari mutu pendidikan. Karena dalam proses pembelajaran terdapat pelayanan terhadap pelanggan utama dalam pendidikan, yaitu siswa.

### **c. Mutu dalam pendidikan**

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, diperlukan paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu (Wirakartakusumah, 1998).

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.

Pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi paling tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/ staf non akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Dalam penerapannya di sekolah, misalnya, paling tidak bahwa guru/pengajar semestinya diberikan hak-hak profesi yang mempunyai otoritas di kelas, dan tidak sekedar sebagai bagian kepanjangan tangan birokrasi di atasnya.

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (*values*) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini memerlukan transparansi (keterbukaan) dari semua pihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk penggunaan semua sumberdayanya.

Akreditasi merupakan suatu pengendalian dari luar melalui proses evaluasi tentang pengembangan mutu lembaga pendidikan tersebut. Hasil akreditasi tersebut perlu diketahui oleh masyarakat yang menunjukkan posisi lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan independen yang berwenang. Di Indonesia pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat, serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi, kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Evaluasi bias dilakukan secara internal atau eksternal. Suatu evaluasi akan lebih bermanfaat bila dilakukan secara berkesinambungan.

Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :

1. Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*).
2. Perlu ditumbuhkembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut.



Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha “jasa” yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya yang utamanya yaitu kepada mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut.

Para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok (Sallis, 1993). Mereka itu adalah *pertama* yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. *Kedua*, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*).

Pelanggan lainnya yang *ketiga* bersifat tersier adalah lapangan kerja, bias pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*). Selain itu, yang *keempat*, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (*internal customers*).

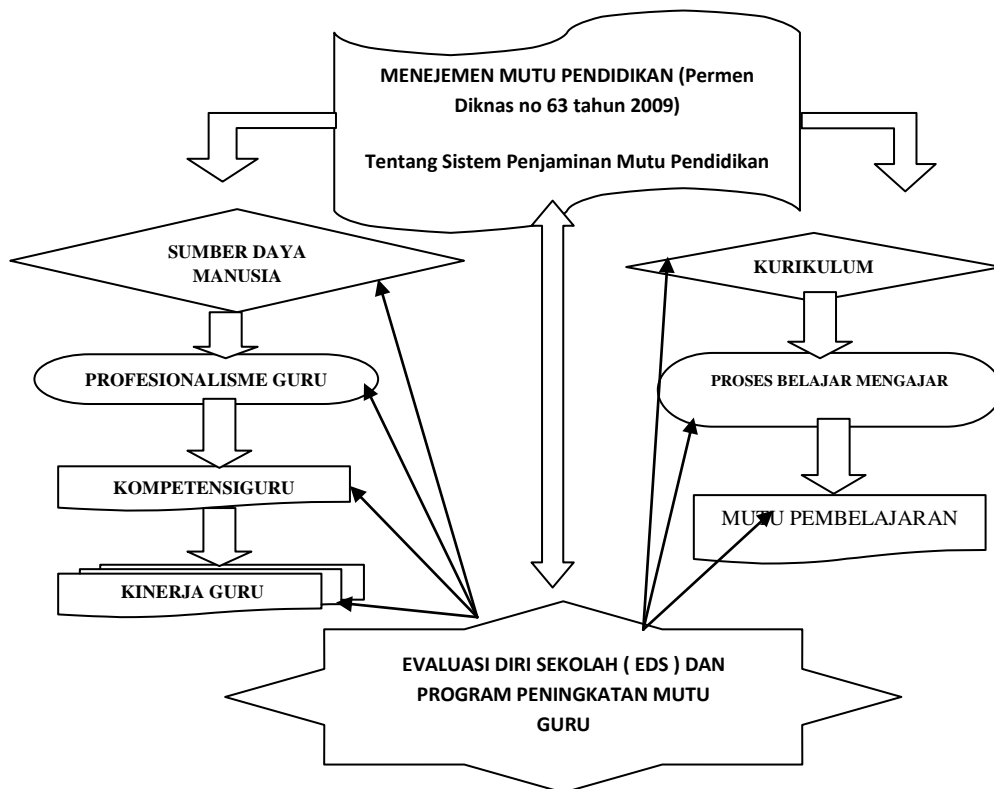
Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun finansial (Karsidi, 2000).

Seperti disebut di atas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing pelanggan di atas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan. satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.



## B. Kerangka Pemikiran

Menurut Riduwan (2013:25 ) kerangka berpikir adalah dasar dari penelitian yang disesuaikan dari fakta – fakta, observasi dan telaah kepustakaan,yang didalamnya memuat teori – teori, kerangka pemikiran juga dijadikan konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian serta mampu menjelaskan hubungan keterkaitan antara variabel – variabel penelitian,sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan – permasalahan penelitian. berdasarkan hal itu kami menjabarkan vriabel – variabel penelitian seperti skeme di bawah ini.



Daftar Gambar : 2.4

Kerangka pemikiran

Dalam hal ini EDS merupakan control internal sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).Kontroling yang terjadi menurut paradigma di atas adalah control terhadap sumberdaya manusia dalam hal ini tentang profesionalismenya,kompetensi gurunya dan

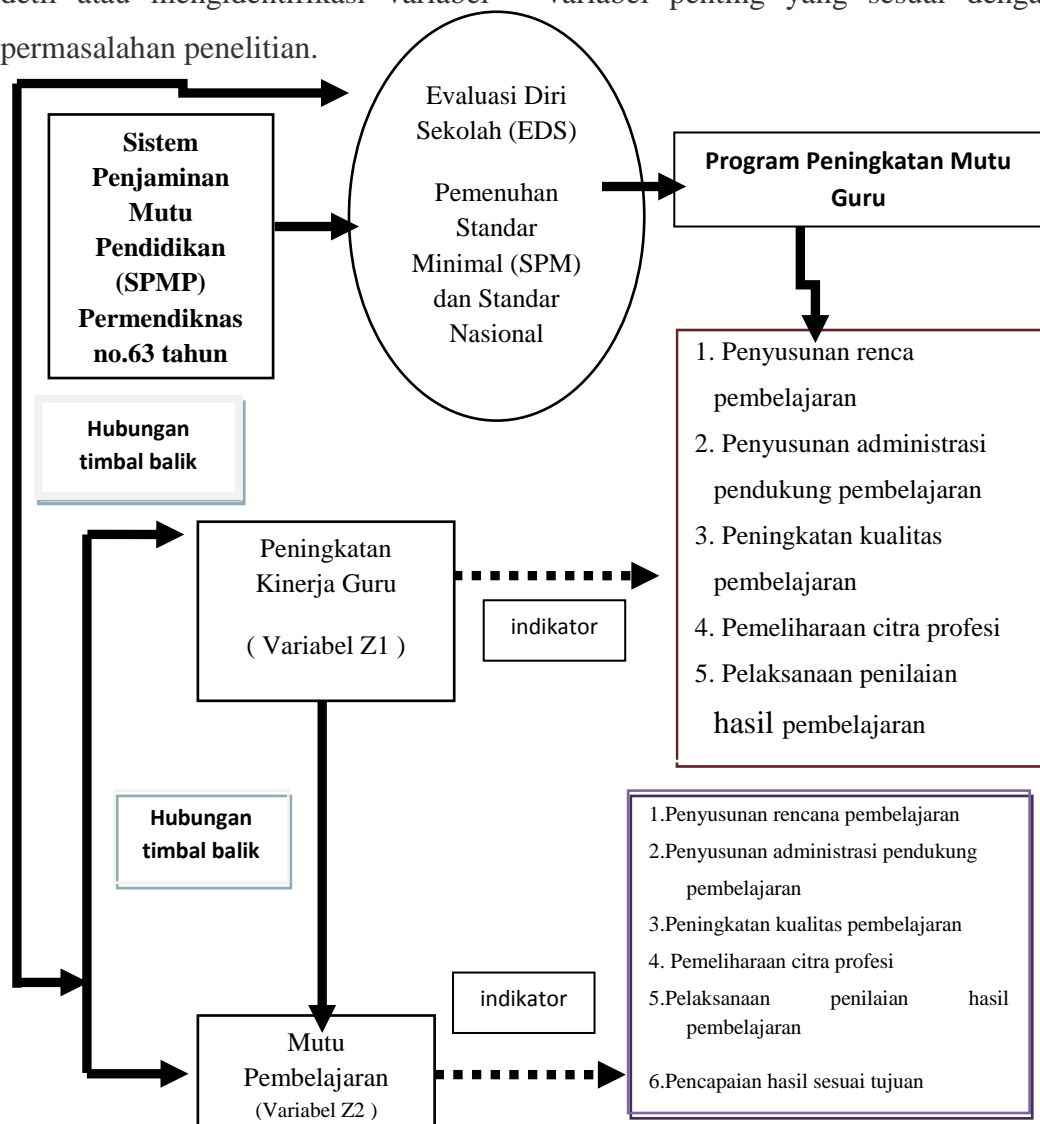
Dadan Wahyu Alamsyah, 2015

**ANALISIS EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS) HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA GURU DAN MUTU PEMBELAJARAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kinerja gurunya. Selain kontroling terhadap sumberdaya manusia EDS juga mempunyai fungsi control terhap kurikulum yang didalamnya termasuk penekananya pada proses belajar dan mutu pembelajaran.

Paradigma penelitian merupakan bagian dari kerangka pemikiran, dimana paradigma penelitian lebih menjelaskan alur antara hubungan variabel yang lebih detil atau mengidentifikasi variabel – variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian.



Daftar Gambar : 2.5

Paradigma penelitian

Paradigma penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel – variabel penelitian secara lebih rinci, dimana Evaluasi Diri Sekolah (EDS) memiliki hubungan dengan kinerja guru, Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

memiliki hubungan dengan Mutu Pembelajaran serta Kinerja guru memiliki hubungan dengan Mutu pembelajaran. Dari paparan tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa EDS memiliki hubungan dengan variabel kinerja guru dan mutu pembelajaran.

### **C. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian dapat disusun berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban – jawaban sementara dari rumusan masalah, sehingga masih memerlukan pembuktian kebenarannya.

Menurut Sugiyono ( 2013 ; 96 ) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan

Jadi berdasarkan kerangka pemikiran tersebut peneliti dapat menentukan hipotesis sementara yaitu:

1. Terdapat hubungan antara Evaluasi Diri Sekolah(EDS) dengan Kinerja Guru
2. Terdapat hubungan antara Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan Mutu Proses Pembelajaran
3. Terdapat hubungan antara Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan Program peningkatan mutu guru
4. Terdapat hubungan antara Program Peningkatan Mutu Guru dengan Mutu proses Pembelajaran
5. Terdapat hubungan Program Peningkatan Mutu Guru dengan Kinerja Guru.



